

Loyalis Persilakan Anas Urbaningrum Pilih Jabatan di PKN Saat Bebas

JAKARTA (IM) - Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang dibesut loyalis Anas Urbaningrum mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU. Ketua Umum PKN, Gede Pasek Suardika, menyebut Anas bisa memilih jabatan apa pun di PKN saat bebas dari penjara.

"Gampanglah itu, tinggal Mas Anas mau minta di mana pun itu bagi kita tidak ada masalah. Tapi biarlah beliau yang menyampaikan," ujar Gede di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (2/8).

Dia menyebut PKN selalu berdiskusi dengan Anas Urbaningrum. Dia mengatakan Anas masih berkontribusi dengan masa hukumannya di Lapas Sukamiskin. "Pada saatnya nanti beliau akan keluar. Sama dengan beliau sudah komitmen biarlah nanti yang menyampaikan (jabatannya)," ucap Gede.

"Tetapi kalau kita tahu ketika pohon ditanam nanti buahnya akan seperti apa kan? Kalau itu memang kita tanam pohon mangga walaupun belum kelihatan mangganya orang sudah tahu ketika berbuah mangganya kelihatan," sambung Gede.

Dia berharap masa hukuman Anas Urbaningrum segera berakhir. Dia tidak menjelaskan kapan Anas

akan bebas.

"Nanti urusan itu sama Kemenkumham yang menguasai itu. Kami berdoa semoga secepatnya semakin baik toh beliau dihukum atas sebuah perbuatan yang tidak pernah lakukan dan kami bisa buktikan itu biarlah Pak Anas yang bercerita," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memotong hukuman mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi. Di tingkat kasasi, Anas dihukum 14 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan. Selain itu, ia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 kepada negara.

"Menjatuhkan pidana terhadap Anas Urbaningrum dengan pidana penjara selama 8 tahun ditambah denda Rp 300 juta subsider tiga bulan," kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro, saat dihubungi detikcom, Rabu (30/9).

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Anas Urbaningrum berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok," sambung Andi. ● mar

2 Polhukam

FOTO: ANT



KPU TERIMA AUDIENSI MRP BAHAS PEMILU DAN PILKADA PAPUA

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kedua kanan) disaksikan Komisioner KPU Mochammad Affudin (kanan) menerima dokumen himpunan keputusan Majelis Rakyat Papua (MRP) dari Ketua MRP Timotius Murib (kedua kiri) dan Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (kiri) saat audiensi terkait Pemilu dan Pilkada Papua di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (2/8). Dalam pertemuan tersebut MRP meminta kepastian hukum soal pembentukan partai lokal, khususnya di wilayah Papua, serta meminta KPU untuk turut mendorong warga asli Papua segera melakukan rekaman E-KTP supaya bisa terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.

Wamendagri Usul Pj Gubernur DOB Dilantik di Papua dan Dihadiri Jokowi

"Kita meminta dari tim kita bagaimana Bapak Presiden hadir di salah satu titik, katakanlah di Merauke, Merauke jadi tempat untuk dipusatkan peresmian tiga DOB yang baru. Sekaligus pelantikan Pj dipusatkan di sana. Harapan kami begitu. Sehingga kita ingin terlebih dahulu melaporkan ke Pak Mendagri. Nanti beliau yang melaporkan ke Pak Presiden dengan kesiapan yang akan kita lakukan," papar John Wempi Wetipo.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Kementerian

Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan peresmian 3 provinsi baru Papua beserta pelantikan pejabat (Pj) gubernurnya digelar sebelum

Desember 2022.

"Kita harapkan sebelum Desember sudah ada," kata Wamendagri John Wempi Wetipo saat menghadiri acara Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional yang digelar BNPT di Jakarta Pusat, Selasa (2/8).

Wempi mengatakan saat ini pihaknya masih merumuskan persiapan peresmian dan pelantikan tiga pejabat gubernur di provinsi baru Papua. Dia pun berharap agar peresmian dan pelantikan pejabat gubernur itu bisa digelar di Papua dan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita meminta dari tim kita bagaimana Bapak Presiden hadir di salah satu titik, katakanlah di Merauke, Merauke jadi tempat untuk dipusatkan peresmian tiga DOB

yang baru. Sekaligus pelantikan Pj dipusatkan di sana. Harapan kami begitu. Sehingga kita ingin terlebih dahulu melaporkan ke Pak Mendagri. Nanti beliau yang melaporkan ke Pak Presiden dengan kesiapan yang akan kita lakukan," papar dia.

Wempi menjelaskan alasannya ingin agar pelantikan pejabat gubernur bisa digelar di Papua dan dihadiri Jokowi. Hal itu untuk menunjukkan bahwa pembentukan DOB ini guna kesejahteraan masyarakat Papua.

"Sehingga gaungnya itu lebih baik bahwa DOB yang hadir ini untuk kesejahteraan rakyat Papua sesuai dengan revisi otsus yang dilaksanakan. Bahwa kehadiran DOB untuk mengangkat harkat derajat martabat orang Papua," imbuh Wempi.

Ditanya mengenai nama-nama calon Pj gubernur, Wempi mengaku belum ada.

Dia mengatakan penunjukan Pj gubernur DOB Papua merupakan kewenangan Presiden Jokowi. "Ini kan tugas Pak Presiden, Pak Presiden tunjuk siapa, kan Kemendagri sebagai mengatur regulasi kita siap untuk jalan," ungkap Wempi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken undang-undang (UU) tentang pembentukan tiga provinsi baru di Papua. Tiga provinsi baru di Papua itu adalah Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

UU itu diteken dengan UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Ketiga UU ini diteken Jokowi pada 25 Juli 2022. ● osm



PENERTIBAN PASAR DARI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL

Kepala Balai POM Palu Agus Riyanto (tengah) menunjukkan sejumlah contoh kosmetik ilegal atau tanpa izin edar saat rilis di Kantor Balai POM di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (8/2). Balai POM melakukan aksi penertiban pasar dari peredaran kosmetik ilegal atau bahan berbahaya dari sejumlah pasar yang ada di wilayah Sulawesi Tengah dan mengamankan ratusan kosmetik tanpa izin edar bahkan palsu sebagai upaya melindungi kesehatan masyarakat.

Dana Pemilu Disediakan Sepenuhnya oleh Pemerintah

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menepis tuduhan publik mengenai mandetnya anggaran untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, pemerintah akan mengawal pemilu termasuk dalam segi anggaran.

Mahfud mengatakan, terkait berlangsungnya pemilu nanti, semua yang diperlukan termasuk instrumen hukum, anggaran, kelembagaan, dan penjadwalan sudah dibicarakan dengan KPU, DPR dan Bawaslu.

"Supaya tidak ada salah paham, misalnya ada berita hari ini, bahwa Pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat cair, itu tidak juga. Karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua stakeholders. Dana yang diperlukan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah," ujar Mahfud dalam keterangannya, Selasa (2/8).

Mahfud menambahkan, dana yang disetujui saat ini sebesar Rp1,24 triliun. Namun, lanjut Mahfud, pencairan anggaran tersebut akan bertahap setiap tahunnya,

yakni di tahun 2022, 2023 hingga 2024 mendatang.

"Cuma kalau sekarang belum cair, itu gampang, KPU tinggal membuat DIP. PAlnya saja. Kalau DIPAlnya sudah jadi kan gampang. Kalau belum ada, DIPA belum bisa, karena itu melanggar keuangan negara. Oleh sebab itu pemerintah menjamin hal ini. Tahun berikutnya anggaran disediakan, berikutnya lagi disediakan," sambung dia.

Mahfud menjelaskan, usulan dari KPU sudah disetujui, seperti kenaikan biaya terhadap panitia, meski tidak 100 persen. Mengenai kegiatan operasional seperti pembangunan gedung-gedung di daerah belum disetujui.

"Saudara, kepada KPU saya ingin menyampaikan pesan, anda harus sungguh sungguh bekerja, menyelenggarakan Pemilu ini dengan sebaik baiknya, dengan penuh profesionalitas, karena apapun yang anda lakukan, itu pasti ada yang menggugat. Tidak ada Pemilu yang tidak ada gugatan. Sejak dulu terjadi seperti itu," pungkasnya. ● han

Bupati HSU Nonaktif Abdul Wahid Dituntut 9 Tahun Penjara

JAKARTA (IM) - Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) nonaktif Abdul Wahid pidana penjara 9 tahun. Abdul Wahid juga diwajibkan membayar denda pengganti senilai Rp26 miliar.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Wahid berupa pidana penjara selama 9 tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah, subsider 1 tahun kurungan)," kata Jaksa Penuntut Umum KPK dalam tuntutanannya, Selasa (2/8).

"Membebankan kepada Terdakwa Abdul Wahid untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 26.071.920.250,00 yang akan dikurangkan dengan nilai aset berupa tanah dan bangunan yang dirampas untuk negara, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar

uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 6 (enam) tahun," demikian tuntutan itu.

Abdul Wahid didakwakan dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Jaksa juga mendakwa Abdul Wahid dengan Pasal 12B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seb-

agaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Serta, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK sebelumnya telah limphakan berkas perkara Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Abdul Wahid sendiri dijerat sebagai tersangka dalam perkara gratifikasi dan pencucian uang. Abdul Wahid sebelumnya juga telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di HSU, Kalimantan Selatan (Kalsel), tahun 2021-2022. ● osm



PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA DAFTAR KE KPU

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) I Gede Pasek Suardika (kanan) bersama sejumlah pengurus partai menyanyikan mars partai saat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (2/8). Hari kedua pendaftaran, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menjadi partai politik kesepuluh yang mendaftarkan diri untuk calon peserta Pemilu tahun 2024.

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA INDEX IDX30

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA INDEX IDX30 yang telah diumumkan melalui surat kabar harian "International Media" tertanggal 28 Januari 2022, kami, PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA INDEX IDX30, dengan ini bermaksud menyampaikan pelaksanaan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA INDEX IDX30 sebagaimana termaktub dalam akta Addendum REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA INDEX IDX30.

Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA INDEX IDX30 serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA

Jakarta, 3 Agustus 2022

Manajer Investasi
REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA INDEX IDX30
PT Syailendra Capital
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan